

**PENGARUH PROFITABILITAS, PROPORSI DEWAN KOMISARIS, KOMITE
AUDIT, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN PROPERTY
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2013**

Oleh:

Alfajri

Pembimbing: Zirman dan Sem Paulus

Faculty of Economics, Riau University Pekanbaru, Indonesia

e-mail : phajrye@gmail.com

*Effect Of Profitability, Independent Commissioner Board, Audit Committee and
Executive Characteristics Against Tax Avoidance On Property Companies
Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI)2010-2013.*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of profitability, independent commissioner board, audit committee and executive characteristics against tax avoidance in a property company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2010-2013. The sample used in this study is a property company that is listed on the Indonesia Stock Exchange based on the selection criteria predefined sample. Sampling method used is purposive sampling and testing this hypothesis using multiple linear regression analysis. Proxy calculation of tax avoidance in the study using proxy Cash Effective Tax Rate (CETR) and the results of this study indicate that the independent variable Profitability proxy Return On Assets (ROA) and executive characteristics significantly affect the partial tax avoidance, but variable independent board and audit committee does not affect the partial tax avoidance, and the coefficient of determination (Adjusted R²) showed the value of 0.592. This suggests that the overall effect of the independent variable profitability, independent board, audit committee and executive characteristics against tax avoidance amounted to only 59.2% while the remaining 40.8% influenced by other variables.

*Keyword : Tax Avoidance, Profitability, Independent Commissioner Board,
Audit Committee and Executive Characteristics*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan

dengan baik demi kesejahteraan negara.

Perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak ini disebut reformasi pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak.

penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi yang terbesar yaitu sekitar 70% dari total penerimaan pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id/>), realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2010 mencapai Rp723.307 milyar. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah tersebut telah mencapai Rp1.310.219 milyar atau meningkat 81,14% dalam kurun waktu 5 tahun. Serta menyumbangkan sebesar 78,81% dari total realisasi APBN 2014. Begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN memungkinkan segala kegiatan pemerintahan dapat berjalan terus. Penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari sektor perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan, sampai pada subsidi BBM. Begitu pentingnya peran pajak bagi kelangsungan negara, maka pajak selalu menjadi fokus pemerintah.

Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena

mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih & Sari, 2013).

Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak yang ada dalam perusahaan.

Ada tiga tahapan/langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam tax planning ada 3 macam cara yang

dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penyelundupan pajak), *tax saving* (penghematan pajak) (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang masih dalam koridor Undang-Undang. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit, dan karakteristik eksekutif. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba

selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.

Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tentulah melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan. Pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut tentu saja memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin sulit dibayangkan bagaimana bisa pimpinan eksekutif suatu perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)? 2) Apakah dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)? 3) Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran

pajak(*tax avoidance*)? 4) Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*)?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*). 2). Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). 3) Untuk menguji pengaruh komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*). 4) Untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*).

TELAAH PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan (*principals*) dengan pihak manajemen (*agent*), dan antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar apabila pengambil keputusan keuangan (*agent*) memang mengambil keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012).

Penghindaran Pajak

Pohan(2013) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan

teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy 2006).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*.

Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dewan Komisaris Independen

Boediono (2005) menyatakan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013).

Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak dan Dewan Komisaris Independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

H₂ : dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit

Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Pohan (2008) menyampaikan dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Maharani (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif

memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good corporate governance

H₃ : komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik Eksekutif

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tentulah melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan. Pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut tentu saja memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin sulit dibayangkan bagaimana bisa pimpinan eksekutif suatu perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*. Budiman (2012) menyebutkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Semakin eksekutif bersifat risk taker, dimana risk taker adalah cara untuk melihat risiko perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

H₄ : karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah perusahaan property yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. Metode *sampling* yang akan digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel meliputi: (1) Perusahaan property yang secara berturut-turut menyampaikan

laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2013; (2) Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* kurang dari satu, agar tidak membuat masalah dalam estimasi model; (3) Perusahaan dengan laba positif; (4); Perusahaan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Studi Literatur dan Pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan penelitian-penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *Cross Section Pooling* data dari perusahaan property. *Cross Section Pooling* data dilakukan dengan cara menjumlahkan perusahaan-perusahaan property yang mampu memenuhi dari kriteria dari sampel yang telah ditentukan selama periode penelitian dari tahun 2010-2013.

Metode analisis data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis pada regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang dilakukan uji normalitas data, uji multikolenieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

a = Bilangan Konstanta
 $b_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi
 X_1 = Profitabilitas
 X_2 = Dewan Komisaris Independen
 X_3 = Komite Audit
 X_4 = Karakteristik Eksekutif
e = error

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang (*loopholes*) yang terdapat pada undang-undang untuk meminimalkan beban pajaknya. Variabel ini diukur menggunakan proksi perhitungan penghindaran pajak dengan metode CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR_{it} = \frac{\text{Beban Pajak}_{it}}{\text{labas sebelum pajak}_{it}}$$

Keterangan :

CETR_{it} : *Cash Effective Tax Rate* perusahaan i pada periode ke t
Beban Pajak_{it} : total beban pajak perusahaan i pada periode ke t
Labas sebelum pajak_{it} : Labas sebelum kena pajak i pada periode ke t

Profitabilitas (X_1)

Profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Assest* adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dewan Komisaris Independen (X₂)

Proporsi dewan komisaris independen adalah persentase perbandingan antara komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan (maharani, 2014)

Komite Audit (X₃)

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013).

Karakteristik Eksekutif (X₄)

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan (paligrova, 2010). Oleh Paligrova (2010) untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Adapun rumus deviasi standar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{T-1}}$$

Keterangan: E= EBITDA/Total Aset
T=Total Sampel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dari 50 populasi perusahaan, hanya sejumlah 16 perusahaan property yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dan diamati selama periode 2010 sampai dengan 2013.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian pada tabel berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	64	.01	.89	.07777	.11098
DKI	64	.20	.71	.4067	.11351
KA	64	2.00	4.00	2.9062	.46184
KE	64	.00	.01	.0020	.00161
CETR	64	.04	.70	.2012	.12361
Valid N (listwise)	64				

Sumber : *Data Olahan 2015*

Hasil Uji Asumsi Klasik

Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi. Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas

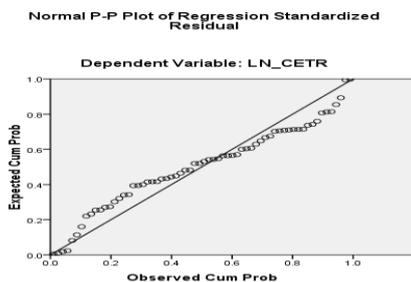
Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, dideteksi dengan menggunakan analisis *normal probability plot*.

Dari pengujian yang dilakukan, didapatkan permasalahan data dalam model regresi berupa terdapat autokorelasi negative dalam model

regresi. Ini dibuktikan dengan nilai *durbin Watson* terletak antara 4-dU dan 4-dL. Model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Ini dibuktikan dengan gambar Normal PP Plot dimana data menyebar jauh dari garis diagonal dan uji Kolmogorov smirnov dengan signifikan $0,040 < 0,05$. Terdapat heterokedastisitas dalam model regresi. Ini dibuktikan pada gambar Scatterplot terlihat data kurang menyebar secara acak. Dan berdasarkan uji Park, variabel DK1 memiliki pengaruh yang signifikan dengan LnRes2.

Oleh karena itu dilakukan transformasi data dengan cara Logaritma Natural (LN). Dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber: *Data Olahan 2015*

Tabel 2
Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33577710
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.125
Kolmogorov-Smirnov Z		1.010
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259

Sumber : Data olahan SPSS

Dari gambar 1 Normal PP Plot diatas terlihat bahwa setelah

dilogkan, data masih terlihat menyebar jauh dari garis diagonal. Namun berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,259 > 0,05$. Dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas (Ghozali, 2008) yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 LN_ROA	.794	1.259
LN_DKI	.815	1.227
LN_KA	.901	1.110
LN_KE	.791	1.264

Sumber: *Data Olahan 2015*

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali, 2008). Jika hasil Durbin-Watson yang didapat berada pada pengujian tidak terdapat gejala autokorelasi ($du < d < (4 - du)$), maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Output uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Durbin Watson

N	Durbin Watson

64	2.057
----	-------

Sumber: *Data Olahan 2015*

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2.057. Pada tabel Durbin-Watson didapat nilai $d_l = 1,730$, nilai $d_u = 2,270$. Maka dari perhitungan ($d_u < d < (4 - d_u)$) atau $1,730 < 2,057 < 2,270$ disimpulkan bahwa D-W test terletak pada daerah tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dengan dilihat melalui uji Park.

Tabel 5
Hasil Uji Park

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-5.767	2.212		-2.607	.012
LN_ROA	.104	.375	.039	.277	.783
LN_DKI	-1.425	1.090	-.184	-1.308	.196
LN_KA	-.437	.629	-.036	-.268	.789
LN_KE	.178	.217	-.117	-.824	.413

Sumber : Data olahan SPSS

Berdasarkan uji Park, diketahui bahwa tidak ada variable independen yang memiliki nilai signifikansi dengan $\text{Ln Abs}^2 < 0,05$. Dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari heterokedastisitas.

Hasil Pengujian Regersi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit dan karakteristik eksekutif terhadap

penghindaran pajak yang dilakukan dengan bantuan *software SPSS*.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-2.275	.366		-6.223	.000
LN_ROA	-.573	.062	-.834	-9.237	.000
LN_DKI	-.098	.180	-.048	-.542	.590
LN_KA	-.137	.269	-.043	-.507	.614
LN_KE	.162	.036	.409	4.523	.000

Sumber: *Data Olahan 2015*

Berdasarkan tabel diatas, didapat dari hasil analisis menggunakan SPSS maka didapat persamaan regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = -2,275 - 0,573X_1 - 0,098X_2 - 0,137X_3 + 0,162X_4 + 0$$

Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2008).

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adj. R Square
1	.786 ^a	.618	.592

Sumber: *Data Olahan 2015*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,592. Artinya adalah bahwa

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 59,2%. Sedangkan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, signifikansi pengujian menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$, artinya bahwa variasi variabel profitabilitas (*Return on Assets/ROA*) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut diperkuat dengan Nilai $-t_{hitung}$ yang lebih besar dari nilai $-t_{tabel}$ ($-t_{hitung} < -t_{tabel} = -9,237 < -2,001$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (**H₁**) yang menyatakan “profitabilitas (*Return on Assets/ROA*) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak”, dapat **diterima**

Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas (*return on asset*) berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* namun dengan nilai koefisien negatif. Hal ini berarti apabila ROA mengalami peningkatan maka aktivitas *tax avoidance* mengalami penurunan. Demikian tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014), Handayani (2015) serta Maharani dan Suardana (2014). Dalam

penelitiannya ditemukan hasil bahwa terdapat pengaruh antara ROA terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, signifikansi pengujian menunjukkan nilai $0,592 > 0,05$, artinya bahwa variasi variabel dewan komisaris independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut diperkuat dengan nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel} = -0,542 > -2,001$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (**H₂**) yang menyatakan “dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak”, dapat **ditolak**.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak tidak dapat didukung oleh data. Banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi penurunan aktivitas *tax avoidance*. Penambahan anggota dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat (Handayani, 2015). Tidak adanya pengaruh hubungan proporsi dewan komisaris independen dengan aktivitas *tax avoidance* disebabkan peran dewan komisaris independen dalam mekanisme tata kelola perusahaan tidak melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik dalam pengambilan keputusan pajak di

perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Penelitian ini menolak hipotesis yang telah dikembangkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Handayani (2015), dan Hanum dan Zulaikha (2013).

Pengaruh komite audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, signifikansi pengujian menunjukkan nilai $0,614 > 0,05$, artinya bahwa variasi variabel komite audit secara parsial tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut diperkuat dengan nilai $-t_{hit} > -t_{tabel} = -0,507 > -2,001$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (**H₃**) yang menyatakan “komite audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak”, dapat **ditolak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan dan lebih cenderung untuk menjalankan tugasnya secara netral dan tepat berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan (Hanum & Zulaikha, 2013).

Banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Penambahan anggota komite audit

hanya untuk memenuhi Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 yang menetapkan komite audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013).

Penelitian ini menolak hipotesis yang telah dikembangkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013); Kurniasih dan Sari (2013); Handayani (2015) dan Singly dan Sukartha (2015).

Pengaruh karakteristik eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, signifikansi pengujian menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$, artinya bahwa variasi variabel karakteristik eksekutif secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut diperkuat dengan Nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel} = 4,523 > 2,001$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (**H₄**) yang menyatakan “karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak”, dapat **diterima**

Tinggi rendahnya nilai risiko perusahaan Mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang tinggi mengindikasikan bahwa eksekutif lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani dalam mengambil risiko. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi aktivitas *tax*

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas *tax avoidance* merupakan sesuatu yang legal (*lawful*) namun juga merupakan sesuatu yang tidak menjadi selera pemerintah. Hanya pihak-pihak yang berani mengambil risiko yang mau melakukan hal tersebut, tentunya termasuk risiko yang tidak mendukung pembangunan nasional melalui pembayaran pajak (Budiman, 2012).

Penelitian ini gagal menolak hipotesis yang telah dikembangkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Budiman (2012), Maharani dan Suardana (2014), Swingly dan Sukartha (2015), dan Handayani (2015).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel profitabilitas (*Return on asset*) berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* namun dengan nilai koefisien negatif. Demikian tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan.

Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Tidak adanya pengaruh hubungan proporsi

dewan komisaris independen dengan aktivitas *tax avoidance* disebabkan peran dewan komisaris independen dalam mekanisme tata kelola perusahaan tidak melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik dalam pengambilan keputusan pajak di perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variabel Karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko yang tinggi mengindikasikan bahwa eksekutif lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani dalam mengambil risiko. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pada kategori perusahaan manufaktur. Penggunaan sampel pada kategori perusahaan lain misalnya perbankan, real estate diharapkan akan memberikan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian ini hanya menggunakan empat periode penelitian, yaitu tahun 2010 hingga 2013. Penggunaan periode yang lebih panjang diharapkan akan

memberikan hasil penelitian yang berbeda. Rendahnya koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Saran

Dengan keterbatasan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu: Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan sampel perusahaan dibidang lain untuk menggeneralisasi dan memperoleh hasil yang lebih valid serta mempertinggi daya uji empiris. Disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar dan kemungkinan memperoleh kondisi yang sebenarnya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang pengukuran penghindaran pajak untuk menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga kemampuan hasil penelitian semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Nuralifmida Ayu, 2011. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*

Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). *Pengaruh*

Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol.8, 95 - 189.

Boediono, Gideon Sb. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar, Bali.*

Budiman, Judi, 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Journal universitas Islam Sultan Agung*

Budiman, J., & Setiyono. (2012). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin 25-28 September 2012*

Ghozali, I. 2008. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Handayani, Cahyaning Dewi, 2015. *pengaruh return on asset, karakter eksekutif, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik*

- terhadap *tax avoidance*.
Syariah Paper Accounting
FEB UMS
- Hanum, H. R., & Zulaikha., 2013.
Pengaruh Karakteristik
Corporate Governance
terhadap *Effective Tax Rate*
(Studi Empiris pada BUMN
yang Terdaftar di BEI 2009
- 2011). *ISSN*, 2, 1 - 10.
- Hardika, Nyoman Sentosa. 2007.
Perencanaan Pajak:
sebagai Strategi
Penghematan Pajak.
Jurnal Bisnis dan
Kewirausahaan. Volume 3
No.2. 103-112.
- Husnan, Suad, Enny pudjiastuti, ss,
2012. *Dasar-Dasar*
Manajemen Keuangan.
Yogyakarta: UPP STIM
YKPN
- Kurniasih, Tommy, Maria M. Ratna
sari, 2013. Pengaruh Return
On Assets, Leverage,
Corporate Governance,
ukuran Perusahaan dan
Kompensasi Rugi Fiskal
Pada Tax Avoidance.
Buletin Studi Ekonomi,
Volume 18, No 1.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahaya, Ketut
Alit Suardana, 2014.
Pengaruh Corporate
Governance, Profitabilitas
Dan Karakteristik Eksekutif
Pada Tax Avoidance
Perusahaan Manufaktur. *E-*
Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana. 9.2
(2014):525-539.
- Paligorova, Teodora, 2010,
Corporate Risk Taking and
Ownership Structure, Bank
of Canada Working Paper,
2010-3.
- Pohan, Chairil Anwar, 2013.
Manajemen Perpajakan.
Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2014.
Pengaruh Profitabilitas,
Kepemilikan Keluarga, Dan
Corporate Governance
Terhadap Penghindaran
Pajak Di Indonesia.
Simposium Nasional
Akuntansi
17Mataram.Lombok.
Universitas Mataram. 24-27
sept 2014
- Siahaan, Pahala, Marthot. 2010.
Hukum Pajak Elementer
Konsep Dasar Perpajakan
Indonesia. Yogyakarta:
Graha Ilmu
- Suandy, Erly, 2006. *Perencanaan*
Pajak. Jakarta: Salemba
Empat.
- Swingly, Calvin, I Made Sukartha,
2015. Pengaruh Karakter
Eksekutif, Komite Audit,
Ukuran Perusahaan,
Leverage Dan Sales Growth
Pada Tax Avoidance. *E-*
Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana. 10.1
(2015):47-62
- [http://www.bps.go.id/linkTabelStatis
/view/id/1286](http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286) diunduh
tanggal 11 maret 2015